

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DI SAAT PANDEMI COVID-19

IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES IN THE PANDEMIC OF THE COVID-19

Bambang Mudjiyanto¹⁾, Amri Dunan²⁾

^{1,2}Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110
bamb037@kominfo.go.id, bambangmudjiyanto26@gmail.com¹⁾
amri007@kominfo.go.id, amridunan007@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Sepanjang sejarahnya, bangsa Indonesia telah menghadapi berbagai bentuk tantangan dan ujian. Hal itu dapat dilalui berkat kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa yang berpedoman pada ideologi Pancasila, yang juga menjadi dasar dan ideologi negara. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan pendapat dalam masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Nilai-nilai Pancasila harus dipahami secara menyeluruh sehingga tercipta kerukunan bangsa. Sila-sila Pancasila dapat menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam menghadapi berbagai tantangan. Di masa pandemi Covid-19, nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong.

Kata Kunci: Implementasi, Nilai Pancasila, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Throughout its history, the Indonesian nation has faced various forms of challenges and tests. It can be passed thanks to the strength of national unity and brotherhood guided by the Pancasila ideology, which is also the basis and ideology of the state. However, in its implementation, there are still differences of opinion in Indonesian society, which has diverse ethnicities, cultures, and religions. The values of Pancasila should be understood thoroughly so that national harmony will be created. The precepts of Pancasila can be a guideline for the Indonesian nation to realize superior human resources in facing various challenges. During the Covid-19 pandemic, Pancasila values were implemented in Indonesian society, namely gotong royong.

Keywords: Implementation, Pancasila Values, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya sejalan dengan Pancasila. Pasal 3 Perpres Nomor: 7 Tahun 2018 tentang BPIP menyebutkan BPIP bertugas sebagai evaluator dan memastikan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tidak bertentangan Pancasila. Oleh sebab itu perlu langkah preventif sejak pra dan proses perumusan dan perancangan agar peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Pancasila. Menurut Yudian Wahyudi “Dalam langkah ini kegiatan institusionalisasi Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki urgensi” (Prasetyo, Andhika dalam *Media Indonesia*, 28 November 2020. Hal:4). Semua peraturan perundang-undangan atau kebijakan harus senantiasa berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan segala ketentuan yang diatur UUD 1945. Karena tujuan utama dari pembentukan negara ialah melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan

kehidupan masyarakat, dan untuk berpartisipasi menuju pembentukan tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pancasila merupakan ideologi terbuka sehingga ideologi Pancasila sangat terbuka, dinamis, serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan atau dikenal dengan revolusi (Fadilah, 2019). Pancasila adalah dasar negara dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Sila-sila yang ada pada Pancasila harus diaplikasikan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia unggul dan nilai-nilai Pancasila menjadi ciri dari setiap insan individu Indonesia. Secara garis besar masyarakat telah memahami ancaman pandemi Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan, melainkan juga berdampak langsung pada menurunnya aktivitas perekonomian yang berujung pada ancaman stabilitas nasional. Untuk itu, dibutuhkan sebuah kesadaran bersama untuk membebaskan bangsa dari ancaman jurang resesi ekonomi dampak Covid-19. Setidaknya ada tiga hal penting yang harus dilakukan agar Indonesia bisa menjawab tantangan pandemi Covid-19. *Pertama*, kerja optimal organ pemerintah. *Kedua*, konsolidasi yang baik antara setiap elemen negara dan rakyat. *Ketiga*, semangat bela negara di setiap insan bangsa (Moerdijat, Lestari dalam *Media Indonesia*, 3 September 2020. Hal:3). Membangkitkan Pancasila sebagai pondasi dalam membangun solidaritas sosial yang merupakan cerminan nilai-nilai kebangsaan. Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan sari pati nilai-nilai Pancasila yang mendasari gotong royong dalam kehidupan bernegara. Tanpa kesadaran gotong royong, maka akan berefek pada dampak sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Tulisan ini ingin mendapatkan pemahaman mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila pada saat pandemi covid-19 yang diperoleh melalui media konvensional.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan library riset (Studi Kepustakaan), penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka, membaca, memahami, mencatat sesuai dengan tema penelitian, kemudian menganalisa data. Densin dan Lincoln (Moleong, 2007:5), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif. Tahapan yang dilalui, yaitu (1) mengumpulkan bahan yang penelitian, (2) membaca bahan pustaka, (3) memahami konten tema penelitian, (4) membuat catatan penelitian, (5) mengelola catatan hasil penelitian, dan (6) menyimpulkan bahan yang akan dibahas dalam penelitian itu.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan dokumentasi dengan mencatat peristiwa berbentuk tulisan, gambar atau hasil berita atau artikel di media cetak ataupun buku-buku dan jurnal nasional maupun internasional. Data yang terkumpul dikaji sesuai dengan tema sehingga menghasilkan suatu analisa sesuai dengan tema penelitian. Alwasilah (2003:155) mengelompokkan antara record dan dokumen, yang termasuk dokumen adalah surat, memoir, otobiografi, diari, jurnal, buku teks, surat wasiat, makalah (position paper), pidato, artikel koran, editorial, catatan medis, pamflet, propaganda, publikasi pemerintah, foto, dan lain sebagainya. Surat Kabar atau koran seperti Kompas dan Media Indonesia dapat dimanfaatkan untuk penelitian untuk suatu kepentingan pembuktian bisa dikatakan sebagai dokumen.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu (1) analisis konten Media Indonesia dan Kompas; mengambil inti dari suatu gagasan atau informasi dari narasumber yang kemudian disimpulkan sesuai dengan tema penelitian, (2) analisis induktif; mengorganisir hal-hal yang berkaitan dengan tema yang dibahas, (3) deskriptif analitik; mengurai dan menganalisis data yang

telah ditemukan sehingga dapat menjawab masalah yang akan dibahas, yakni tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di masa pandemi Covid-19.

Langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting social terejawantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan (Satori dan Komariah., 2009: 28-29).

Secara teknik, content analysis mencakup upaya-upaya. Klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat prediksi. Content analysis sering digunakan dalam analisis-analisis verifikasi. Cara kerja atau logika analisis data ini sesungguhnya sama dengan kebanyakan analisis data kualitatif. Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis tertentu pula. Secara lebih jelas, alur analisis dengan menggunakan teknik content analysis sebagai berikut: 1) menemukan lambang/symbol; 2) klasifikasi data berdasarkan lambang/symbol; dan 3) prediksi/menganalisis data (Suharsaputra, Uhar, 2012: 224).

PEMBAHASAN

Penguatan Pancasila

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi ini peran Pancasila sangatlah penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Globalisasi dan teknologi informasi memungkinkan tidak ada sekat diantara negara, sehingga berbagai kebudayaan asing yang tak sesuai dengan kepribadian bangsa dapat masuk dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Menjamahnya globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap luntarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kedangkalan paham ideologi Pancasila. Lima sasaran penguatan Pancasila, meliputi: Pertama, penguatan pemahaman terhadap Pancasila. Kedua, penguatan pelembagaan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan hukum dan praktik institusional kementerian/lembaga negara. Ketiga, penguatan inklusi sosial di masyarakat. Keempat, penguatan keteladanan Pancasila dalam perilaku penyelenggara negara dan masyarakat. Serta, kelima perwujudan keadilan sosial dalam kebijakan pembangunan.

Memaknai nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, oleh sebab itu keberadaannya tidak hanya dijadikan simbol semata. Pancasila lahir dari perjalanan sejarah bangsa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 diharapkan dapat dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi dilandasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga sebaiknya dijadikan pedoman dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia dapat terlaksana.

Survei yang dilakukan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2018, menunjukkan stagnannya skor ketahanan ideologi nasional, sebanyak 2,44 (kategori kurang tangguh) (Arif, Syaiful dalam Media Indonesia, 21 Oktober 2020. Hal: 6). Secara substansial, aspirasi itu memang sangat penting. Artinya, masyarakat membutuhkan sosialisasi, internalisasi, dan edukasi Pancasila yang masif seperti masa Orde Baru. Berkembangnya aspirasi dari masyarakat untuk menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Raibnya ‘penataran P-4’ membuahkkan krisis ideologi bangsa, yang membuat generasi muda tidak lagi memahami nilai-nilai kebangsaan sendiri. Aspirasi penghidupan P-4, diperlukan perumusan materi induk Pancasila berdasarkan pemikiran perumusan Pancasila pada fase historis Sidang BPUPKI-PPKI. Perumusan itu menjadi upaya untuk memurnikan kembali Pancasila pada akar historisnya. Menghidupkan kembali P-4, harus dirumuskan dengan hati-hati, sebab secara yuridis, P-4 telah dicabut TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4.

Terbitnya Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1945. Di dalam Diktum Menimbang Huruf E Keppres tersebut, ditetapkan bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945, dirumuskan pada 22 Juni 1945, dan disahkan rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945. Ketiga fase kelahiran, perumusan, dan pengesahan tersebut merupakan kesatuan proses yang saling mengandaikan dan menyempurnakan. Keppres ini berdampak akademik sangat mendasar, yakni penegasan tentang akar dari Pancasila, yang bukan terbatas pada fase 18 Agustus 1945, melainkan 1 Juni 1945. Sebab 18 Agustus 1945 bukan hari lahir Pancasila, melainkan Hari Konstitusi sebagaimana penetapan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2008.

Pengakaran pada 1 Juni 1945 menandakan ‘dimensi kemurnian’ Pancasila yang lebih murni dari konsep pemurnian Orde Baru. Oleh Karena itu, pemurnian Pancasila oleh Orde Baru, sebenarnya, mengingkari kemurnian Pancasila itu sendiri. Karena, tidak dilandaskan pada akar historisnya yang paling awal. Sebagaimana Diktum Menimbang Keppres No. 24 Tahun 2016 tersebut, kemurnian Pancasila terletak pada diskursus panjang yang merentang dari 1 Juni 1945 – 18 Agustus 1945. Artinya, merentang dalam perdebatan panjang para pendiri negara. Tentu perdebatan yang akhirnya melahirkan konsensus dasar negara ini berangkat dari ide Soekarno pada 1 Juni 1945, sebagaimana instruksi Ketua BPUPK, dr. Radjiman Widiadinigrat. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan cara; penguatan sistem pendidikan, peningkatan jati diri dan karakter bangsa, peningkatan komitmen pemimpin nasional, peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan daya tangkal akan pengaruh negatif melalui pendidikan, sosialisasi dan kerjasama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menangkal penyebaran paham-paham radikal (Pudjiastuti, 2020).

Etika Kehidupan Berbangsa

Etika merupakan basis fundamental dalam proses terbentuknya suatu bangsa. Etika berbangsa juga merupakan fondasi bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Etika kehidupan berbangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pengaturan terkait etika kehidupan berbangsa telah rinci dalam Ketetapan (TAP) MPR VI/2001. Bamsuet menilai “Meletakkan basis etika dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan agar terwujud tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktubdalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. (Bamsuet dalam Media Indonesia, 12 November 2020. Hal: 5). Keprihatinan sejak terjadinya krisis multidimensional, munculnya ancaman serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu, tampak jelas dalam konflik sosial berkepanjangan yang terjadi di Indonesia. Krisis juga memudahkan sopan santun yang sebetulnya menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan tegaknya etika kehidupan berbangsa, tujuan bangsa Indonesia untuk makmur dan sejahtera lebih mudah terwujud.

Perubahan gaya hidup masyarakat ini terjadi karena disrupsi di bidang teknologi, sosiokultural, dan lingkungan. Disrupsi pada teknologi membuat sektor lainnya juga terdampak. Sebut saja munculnya era otomatisasi, big data, percetakan 3D, hingga kecerdasan buatan. Dampaknya meluas hingga, privasi, dan kesehatan. Etika yang ditetapkan MPR itu merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Terdapat beberapa pokok-pokok etika yang patut dijalankan dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok tersebut ialah mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Dalam etika politik dan pemerintahan sebaiknya menegakkan kembali etika para pejabat politik untuk terus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, dan dapat dijadikan teladan. Etika penegakkan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Pendidikan Karakter Pancasila

Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan mendidik yang diperuntukkan bagi generasi selanjutnya, yaitu membentuk penyempurnaan diri secara terus-menerus dan melatih diri demi menuju kearah hidup yang lebih baik. Bentuk nyata dari pembentukan karakter ialah memberi nilai moral atau rasa hormat yang sejalan dengan tradisi leluhur kepada generasi penerus, yaitu: kebaikan, kesetiaan, dan perilaku sejalan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tolok ukur utama pendidikan karakter ialah nilai-nilai yang bersumber dari agama yang dapat menumbuhkan karakter yang kuat bagi peserta didik. Nilai-nilai budaya lokal yang dipadukan dalam kurikulum berbasis karakter dapat mewujudkan perilaku yang sudah mentradisi dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan karakter menjadi kunci utama untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan pada abad ke-21. Karena itu, nilai tersebut harus tertanam di lingkungan pendidikan, keluarga, maupun masyarakat. Memprioritaskan pendidikan karakter Pancasila dapat mewujudkan manusia bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Tujuannya adalah berkomitmen untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khususnya (Hendarman dalam Media Indonesia, 25 November 2020. Hal: 2).

Karakter kepahlawanan perlu juga ditanamkan kepada generasi muda, seperti cinta Tanah Air, rela berkorban, jujur dan senantiasa mengutamakan kepentingan orang banyak jika dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Apalagi di masa pandemi Covid-19, karakter-karakter kepahlawanan semacam itu sangatlah diperlukan dan menjadi kunci kesuksesan

bangsa Indonesia bertahan di masa sulit ini. Pendidikan karakter yang ditanamkan kepada generasi muda Indonesia dapat menjadikan mereka agen kebangkitan di masa pandemi Covid-19. Kehadiran para pahlawan kemanusiaan yang turut meringankan beban rakyat akibat pandemi Covid-19. Upaya pendidikan karakter dilakukan melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila yang merupakan pondasi bagi arah pembangunan nasional. Internalisasi nilai-nilai karakter bisa dimulai secara teoritis di bangku pendidikan kemudian dipraktikkan di kegiatan lapangan. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala setiap hari dan terwujud dalam setiap perubahan individu. Pada masa pandemi seperti saat ini, terasa sulit melihat sisi positif dari bencana yang melanda. Namun, justru pada saat sulit, sila-sila Pancasila terlihat jelas mendarah daging pada masyarakat. Kalau melihat di sekeliling dengan lebih peka, bisa melihat pahlawan-pahlawan Pancasila yang menyalakan lilin-lilin kemanusiaan di lingkungan masing-masing. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa telah mengakar yang menyambung masa lalu dan masa depan menjadi perekat kehidupan warga negara yang beragam suku, budaya dan agama. Pancasila menjadi pemersatu karena lahir dari harmonisasi agama dan nasionalisme kebangsaan. Pancasila mengakomodasi kepentingan semua golongan, sehingga sampai saat ini masih relevan menjadi falsafah kehidupan berbangsa. Ini menunjukkan Pancasila lahir mengusung semangat kebersamaan dan kesetaraan.

Para pemuda Indonesia dituntut memiliki karakter yang baik di tengah perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Jika itu tidak dimiliki pemuda Indonesia, mereka akan tergerus arus informasi yang sesat. Pendidikan karakter sangat penting. Apabila pemuda tidak punya karakter yang kuat, berintegritas, dan kemampuan berpikir kritis, maka akan tergerus dengan berbagai macam informasi yang tidak benar (Anwar Makarim, Nadiem dalam Media Indonesia, 28 Oktober 2020. Hal: 1). Pendidikan Pancasila secara masif penting diterapkan kepada masyarakat agar mereka memiliki tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tindakan bela negara. Pentingnya proses pendidikan Pancasila, di dalamnya termuat pula pendidikan politik yang mengajarkan kebangsaan, bukan politik adu domba atau politik segala cara.

Pendidikan Pancasila harus secara masif diberikan kepada masyarakat sejak dini, utamanya sejak di sekolah dasar. Kemampuan kognitif siswa idealnya dikembangkan setelah pendidikan Pancasila telah menjadi fundamen. Toleransi, gotong royong, dan sikap empati itu bukan dalam imajinasi, tetapi harus dipraktekkan dalam hidup. Mestinya pendidikan dasar tidak langsung menysar aspek-aspek kognitif. Fundamen akhlak dan budi pekerti yang harus diperkuat dulu sejak dini (Latif, Yudi dalam Kompas, 8 September 2018. Hal:4).

Pancasila harus dipahami setiap warga negara sebagai pandangan hidup, baru kemudian dipandang sebagai ideologi negara. Untuk menuju hal itu, tak ada jalan pintas. Harus ada penanaman nilai-nilai Pancasila sehingga membudaya di dalam hidup masyarakat melalui kebiasaan. Kalau rakyat ingin baik, rakyat harus memahami wawasan dasar pandangan hidup bangsa ini dan hal itu harus diolah sejak dini. Bukan hanya sebagai mata pelajaran, tetapi harus diterapkan pada semua kurikulum. Belajar Pancasila bukan hanya dari satu sudut pelajaran Pancasila. Edukasi dan sosialisasi pendidikan karakter dapat diberikan melalui media yang lebih efektif bagi generasi muda, seperti media televisi, radio, video, dan media digital lainnya. Penyediaan media-media bernilai karakter dengan merujuk profil pelajar Pancasila, dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, yakni bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Pancasila Selaras Syariat Islam

Pendiri bangsa telah meletakkan fondasi yang kuat dalam bentuk dasar negara Pancasila. Pancasila adalah hasil konsensus berbagai elemen di Indonesia, baik kelompok nasional maupun

agama. Pancasila lahir sebagai ideologi yang menyadari realitas kemajemukan Indonesia. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia Muslim, bukan pendekatan mayoritarianisme yang dipilih para pendiri bangsa, melainkan pendekatan yang mengakomodasi segala perbedaan untuk menuju persatuan. Survei kerukunan umat beragama dari Litbang Kementerian Agama menunjukkan, indeks kerukunan beragama di Indonesia mencapai 72,20 pada tahun 2017, 70,9 pada tahun 2018, dan 73,93 pada tahun 2019. “Kerukunan adalah DNA bangsa Indonesia. Dalam berbagai forum dialog antar iman internasional, Indonesia sering menjadi model dan rujukan bagaimana membangun harmoni dan kerukunan intern serta antarumat beragama” (Mu’ti, Abdul dalam Kompas, 3 September 2020. Hal: 5).

Pancasila dinilai tak bertentangan, bahkan selaras dengan syariat Islam. Bahkan, Pancasila merupakan syariat itu sendiri karena dalam teks-teks syariat ditemukan sejumlah ayat dan hadis yang patut menjadi dalil atau pun landasan bagi setiap sila. (Muhajir, Afifuddin dalam Kompas, 21 Januari 2021. Hal: 5) mengatakan, Allah SWT menakdirkan Pancasila, sejak kemunculannya, sebagai solusi persoalan dan mengurai perbedaan. (Syuriah, Rais, 2021) dalam media yang sama, mengaku tak menemukan satu kejanggalan pun, baik dalam bentuk maupun kandungan maknanya. Maka, menurut akal sehat, sudah semestinya Pancasila sebagai keputusan final. Seandainya Pancasila diposisikan dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, tentu Indonesia akan jauh lebih baik dari keadaannya saat ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya adalah negara syar’i yang sesuai dengan teks-teks dan tujuan-tujuan syariat. Pancasila bukan penghalang untuk menerapkan aturan syariat di negara yang berlandaskan atasnya.

Pancasila masih relevan bagi kehidupan bangsa karena lahir dari kesepakatan bersama. Menjadi bangsa Indonesia artinya harus siap hidup bersama dalam keberagaman. Proses lahirnya Pancasila tidak bisa dipisahkan dari agama. Pasalnya, penggodokan Pancasila melibatkan para tokoh agama dan tokoh nasional. Meski pada awalnya ada dorongan menjadikan Islam sebagai landasan negara, akhirnya para tokoh bangsa saat itu menyepakati Pancasila menjadi ideologi bersama. Namun kepentingan agama tetap diakomodasi dalam sila-sila Pancasila. Misalnya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya negara mengakui dan melindungi keagamaan warganya. Bahkan, negara memfasilitasi warga dalam menjalankan ajaran agamanya (Rumadi dalam Kompas, 6 November 2018. Hal: 4).

Kendati demikian, nilai-nilai Pancasila merefleksikan nilai-nilai Islam. “Nilai Islam itu tercitrakan dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menggambarkan keyakinan warga bangsa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang juga merupakan salah satu nilai dan prinsip penting dalam Islam (Mahfud dalam Kompas, 1 November 2020. Hal: 2). Nilai-nilai Islam juga mewujud dalam empat sila lainnya, yakni kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan atau demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai itu juga merupakan prinsip di dalam Islam dan merupakan nilai yang tak dapat dilepaskan dari substansi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Karena itu, Islam sama sekali tak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Islam pun kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi.

Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk sebagai hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa. Pancasila tidak boleh diganti dengan ideologi lain. Upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila tidak pernah berhasil karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga merupakan turunan dari ajaran agama. Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional. Untuk menjaga agar Pancasila tetap dipahami secara komprehensif, Pancasila tidak boleh dipahami secara parsial antara satu sila dan sila yang lain. Pemahaman Pancasila secara utuh sebagaimana dirumuskan dan dipahami para pendiri bangsa sangat penting. Dengan pemahaman yang utuh seperti itu, berarti

Pancasila tidak boleh didorong ke arah pemahaman yang menyimpang, seperti sekularisme, liberalisme, atau komunisme.

Agama juga seharusnya dipahami secara moderat dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama. Sebaliknya, pemahaman yang bersifat radikal, ekstrem, atau liberal tidak sesuai dengan ajaran agama. Adapun Pancasila dianggap mengandung nilai-nilai yang kuat untuk menjaga kerukunan bermasyarakat dan kehidupan umat beragama. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme, perlu dilakukan pendekatan moderasi beragama, bukan dengan pendekatan kekerasan. Salah satu upaya untuk mempertahankan negara ini ialah dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, salah satunya toleransi yang dicontohkan para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Air (Moerdijat, Lestari dalam Media Indonesia, 28 November 2020. Hal: 3). Nilai-nilai toleransi yang dijunjung tinggi dan dijaga para wali, membuat Islam dapat diterima semua orang. Saat ini, nilai-nilai kebangsaan tersebut, juga terkandung dalam empat konsensus kebangsaan, seperti Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Organisasi Islam besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebab, Pancasila ditegakkan di atas keluhuran nilai ajaran agama. Keberhasilan menerapkan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan negara yang damai sebab tak satu pun sila Pancasila yang bertentangan dengan agama. "Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara yang beragama dan religius" (Burhani, Ahmad Najib dalam Kompas, 6 November 2018. Hal :4). Ketua Umum Asosiasi Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, Setiawan (2021), menekankan pentingnya komunikasi publik terkait dengan Covid-19 dengan melibatkan tokoh agama. Tokoh agama berperan besar memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Covid-19 bukanlah takdir yang harus diterima masyarakat tanpa melakukan ikhtiar. Ini sebuah musibah yang diterima kita dan ini jadi tanggung jawab kita semua, jangan hanya pemerintah yang menanggung. Kesadaran seperti itu harus dibangun secara kolektif dengan melibatkan tokoh agama.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas memiliki tingkat religiusitas tinggi terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok masyarakat dalam ruang penerimaan. Kelompok masyarakat tersebut menerima Covid-19 sebagai musibah dan mereka memiliki kesadaran bahwa virus tersebut dapat dihilangkan. Sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah seperti program vaksinasi, mereka bisa menerima. Kedua, kelompok masyarakat pada ruang penolakan. Kelompok tersebut menganggap Covid-19 merupakan takdir yang tidak bisa diubah dan banyak mempertanyakan terkait dengan kehalalan vaksin. Jadi, kebijakan dari pemerintah akan ditolak mentah-mentah oleh kelompok tersebut. Ketiga, kelompok masyarakat di ruang keraguan, yang belum bisa menerima ataupun menolak pandemi Covid-19. Kelompok ini juga menjadi tantangan tersendiri karena mereka ragu dan tidak bisa memberikan keputusan konkret. Untuk itu, peran tokoh agama menjadi penting dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat luas (Setiawan, Erik, dalam Media Indonesia, 31 Januari 2021. Hal:2).

Keraguan, ketakutan, bahkan ketidakpercayaan terhadap vaksin yang disebabkan oleh informasi yang keliru dan berita bohong menjadi hambatan terbesar vaksinasi, bahkan jauh sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Ketika sejumlah negara mulai menggelar vaksinasi Covid-19, fenomena itu bisa menggagalkan target vaksinasi. Menyadari betapa disinformasi bisa begitu merusak upaya pengendalian pandemi, para imam di Inggris turun tangan membantu dengan memanfaatkan pengaruh mereka yang strategis sebagai tokoh agama di kalangan komunitas Muslim. Salah satu caranya, menjadikan khutbah Jumat sebagai sarana penyampaian informasi.

Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), antara 16-19 Desember 2020 terhadap 1.202 responden, menyatakan terdapat 40% masih ragu-ragu untuk divaksinasi Covid-19, hanya 37% bersedia divaksinasi Covid-19, dan selebihnya 17%, menyatakan

betul-betul menolak divaksinasi. Survei yang dilakukan Kemenkes juga menemukan data yang kurang lebih serupa. Hanya sepertiga (30-an%) warga yang bersedia divaksin. Alasan penolakan untuk divaksinasi Covid-19 mencakup keamanan vaksin (30%), keampuhan (22%), ketidakpercayaan pada jenis vaksin (13%), takut efek samping seperti demam dan rasa sakit (12%) dan alasan agama (8%) (Manila, IGK, dalam Media Indonesia, 5 Februari 2021. Hal:6). Ketua Dewan Penasihat Masjid dan Imam Nasional (MINAB) Inggris Qari Asim memimpin langsung gerakan tersebut. Secara terbuka, ia menganjurkan vaksinasi yang menurut dia sejalan dengan Islam. “Kami yakin bahwa dua vaksin yang sudah dipakai di Inggris, yaitu vaksin dari Pfizer-BioNtech dan Oxford-AstraZeneca, diperbolehkan dari perspektif Islam.” Keraguan, kecemasan, dan kekhawatiran yang masih muncul didorong oleh informasi yang salah, teori konspirasi, berita bohong, dan rumor. (Asim, Qari dalam Kompas, 28 Januari 2021:4).

Pancasila Ideologi Terbuka

Perjalanan bangsa Indonesia setelah merdeka dari penjajahan telah membuktikan bahwa ideologi Pancasila lah yang pas bagi masyarakat Indonesia, tak terkecuali bagi kalangan milenial. “Ideologi Pancasila dipastikan tidak akan tergantikan. Tapi, sebagai ideologi yang hidup, sistem nilainya bisa diterjemahkan sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai landasan moral bangsa harus bisa dipahami kalangan milenial” (Cahyono, Ma’ruf dalam Media Indonesia, 27 November 2018. Hal. 11). Kemajuan teknologi yang sangat pesat dan dinamis saat ini di setiap lini sudah pasti akan dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat Indonesia. Hal ini pasti akan berdampak pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap Pancasila. Generasi milenial menjadi sasaran utama sosialisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai manifestasi budaya bangsa. Karena generasi milenial ialah penerus perjuangan bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak bisa lepas dari pengaruh nilai yang berkembang di masyarakat pada zaman kekinian. Tentu nilai-nilai baru harus diterima, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Dalam membangun suatu bangsa, dibutuhkan sebuah keyakinan yang dinamakan ideologi sebagai landasannya dan itu merupakan jati diri bangsa.

Bagaimana pun national building dan state building harus dilandasi dengan ideologi. Tanpa ideologi, tentu tidak akan menjadi bangsa besar. Sebagai kaum milenial harus mampu menerjemahkan ideologi yang hidup. Yakni sebuah ideologi yang mampu diterjemahkan sesuai dengan perkembangan zaman. Di era milenial, terjadi dinamika atas nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa, itu sudah pasti. Pancasila sebagai ideologi terbuka, secara dinamis harus bisa menerima perkembangan, dengan adanya batasan-batasan toleransi. Pancasila sebagai landasan nilai moral bangsa Indonesia, harus bisa dipahami kalangan generasi muda. Pada sila Ketuhanan merupakan ruh kebangsaan, sedangkan sila kemanusiaan adalah watak kebangsaan serta sila persatuan merupakan ikatan kebangsaan. Adapun sila keempat mengenai demokrasi merupakan media atau alat kebangsaan, berikutnya sila kelima keadilan sosial merupakan tujuan dari kebangsaan Indonesia. Generasi muda harus kukuh dalam menjaga ideologi agar tidak tergerus atau hilang oleh zaman.

Pancasila adalah sebuah ideologi. Ideologi itu menjadi meja statis di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diletakkan di atasnya, dan juga merupakan “Leitstar” atau bintang penuntun dinamis, yang memberi tutunan ke mana arah NKRI harus dibawa, yaitu ke arah sebuah negara sosialis modern yang bersifat religius (berke-Tuhan-an). Penjelasan ini diberikan Bung Karno secara khusus saat mengupas Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks keseluruhan Pancasila, tentunya, arahnya sebuah negara sosialis modern yang tak hanya bersifat religius (berke-Tuhan-an), tetapi juga mengantar masyarakat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Soekarnoputra, Guntur dalam Kompas, 15 September 2020. Hal: 7).

Sejak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tak mudah mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur karena kondisi sosial, politik, ekonomi dan keamanan saat itu masih terus dalam rongrongan kolonialisme dan kapitalisme. Di samping adanya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, harapan besar bagi perubahan bangsa masih terletak ditangan pemuda. Menengok hasil jajak pendapat Litbang Kompas sejak 2015 hingga 2019, tampak citra positif pemuda terus membaik dari 46,4 persen pada tahun 2015 menjadi 66,2 persen tahun 2019. Tentu ini menjadi modal sosial bagi para pemuda untuk terus berperan sebagai agen ideologi di setiap daerah (Afrianto, Dedy dalam Kompas, 28 Oktober 2020. Hal: 3). Bonus demografi tentu perlu dimanfaatkan untuk melahirkan generasi pemikir dan bukan hanya generasi pekerja. Persis seperti harapan Soekarno pada pidato peringatan kemerdekaan Indonesia tahun 1963, agar Indonesia tidak menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Maka, menciptakan generasi pemikir sebagai agen ideologi bangsa adalah hal mutlak yang perlu dilakukan di tengah bonus demografi.

Pancasila Panduan Bangsa

Dalam menghadapi berbagai rintangan zaman, Pancasila selalu mampu memandu bangsa untuk melaluinya. Tak terkecuali saat ketika bangsa menghadapi pandemi Covid-19. Bangsa Indonesia pernah menghadapi berbagai bentuk tantangan. Sejak zaman kemerdekaan, masa pembangunan, hingga era globalisasi, tantangan datang silih berganti. Termasuk saat ketika bangsa dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19. Namun, jika melihat sejarah bangsa, tantangan dan rintangan selalu berhasil dilalui berkat persatuan dan persaudaraan yang kuat membuat bangsa Indonesia selalu berhasil melewati berbagai tantangan zaman. Persatuan dan persaudaraan itu terjalin berkat panduan Pancasila. Semua tantangan itu dapat dilalui berkat kekuatan persatuan dan persaudaraan bangsa yang dipandu ideologi Pancasila. Pentingnya segenap bangsa Indonesia membulatkan tekad untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Rongrongan terhadap negara sejak proklamasi kemerdekaan, baik dari dalam maupun luar negeri, kemungkinan terjadi karena kelengahan dan kekurangwaspadaan bangsa terhadap berbagai upaya menumbangkan Pancasila. Sebagai bangsa, harus bersama merawat pembangunan agar berkesinambungan. Kewajiban itu dapat dilakukan jika kita sebagai bangsa memiliki kebanggaannasional (national pride). Kebanggaan nasional dapat dibangkitkan dari prestasi bangsa di masa lampau. Indonesia jelas sangat kaya akan prestasi bangsa di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, ketatanegaraan, teknologi, dan seni. Misalnya, Candi Borobudur, Prambanan di bidang arsitektur, pinisi di bidang kemaritiman, selain kearifan lokal.

Setiap prestasi bangsa itu harus menjadi kebanggaan. Kita perlu merawatnya dengan visi tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menuju Indonesia Emas di 2045, acuan haluan negara menjadi penting agar tak ada keterputusan antargenerasi. Membangun "Indonesia Masa Depan" mau tidak mau mesti bertumpu pada "Indonesia Masa Lalu" (Karsidi, Ravik dalam Kompas, 30 September 2020. Hal: 7). Kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan yang tidak mudah, tetapi penuh makna. Pada saat itu, seluruh elemen masyarakat tanpa sekat berusaha dengan mempertaruhkan jiwa raganya meraih dan mempertahankan kemerdekaan yang menjadi mimpi besar bangsa Indonesia. Kesadaran akan pentingnya persatuan itu memang pada akhirnya mengantarkan bangsa ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan.

Hal yang mustahil diraih apabila semuanya berjuang untuk kepentingan kelompok atau golongannya. Hal tersebut setidaknya terlihat sebelum 1908, rakyat bergerak dalam konsep

terkotak-kotak sehingga akhirnya mudah dipukul mundur oleh penjajah. Apalagi, dengan sistem tersebut memudahkan pihak penjajah melakukan politik adu domba sehingga yang terjadi justru bertikai antar sesamanya. Setelah 1908, kesadaran nasional perlahan, tapi pasti mulai muncul dan menguat melalui ragam organisasi. Kesadaran tersebut kemudian termanifestasikan dalam ikrar Sumpah Pemuda 1928 dengan banyaknya elemen akhirnya menggelorakan semangat persatuan dalam bingkai Indonesia. Arah perjuangan pun berubah, banyak yang bersatu padu untuk kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan kelompok atau golongan. Hal itu yang menyebabkan bangsa ini dalam perjalanannya merebut dan mempertahankan kemerdekaan semakin lebih berarti dan membentuk nilai abadi tentang persatuan itu sendiri (Romualdi, Kristoforus Bagas dalam Media Indonesia, 8 September 2020. Hal: 7).

Bela Negara di Dunia Maya

Bela negara tidak hanya penting di masa revolusi kemerdekaan, tetapi juga masa kini. Generasi muda bisa memanfaatkan teknologi media komunikasi untuk memperkuat perekonomian, mempererat persatuan bangsa, mendorong literasi media, mencegah berita hoaks, dan menjaga Pancasila dari rongrongan ideologi transnasional. Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar kelima di dunia, Indonesia mestinya tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga memanfaatkannya sebagai media untuk membela negara. Generasi muda memiliki peran penting sebagai aktor penggerak sejarah. Zaman telah berubah, manusia sejak beberapa tahun lalu telah memasuki era teknologi. Pada era teknologi ini, informasi semakin mudah tersebar melalui media sosial. Hingga saat ini hoaks masih tidak bisa hilang dari kehidupan manusia. Justru penyebarannya semakin cepat karena arus informasi daring yang mudah menjangkau area yang lebih luas jika dibandingkan dengan di era sebelumnya.

Hoaks tentu menjadi salah satu masalah sosial yang perlu untuk dihindari karena dapat mengancam kesatuan bernegara. Salah satu contoh ialah mengenai isu-isu politik di Indonesia yang semakin hari makin tidak menunjukkan kredibilitas yang baik. Isu-isu tersebut, apabila mudah dipercaya, dapat menyebabkan kegaduhan publik dan berdampak pada struktur kehidupan riil di dalam masyarakat (Najmah, Sofia dalam Media Indonesia, 8 September 2020. Hal: 7). Membela negara di dunia maya secara nyata tidak hanya omong kosong belaka. Di dunia maya seperti yang telah diketahui terjadi orang yang melecehkan Pancasila, pelecehan pada lagu kebangsaan, disinformatisasi dan propaganda yang mengancam kehormatan dan keutuhan bangsa dan negara. Warga negara juga merupakan representasi di dunia maya. Contoh pelecehan-pelecehan tersebut menunjukkan bahwa negara hadir bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Warga juga seperti itu. Warga di dunia maya juga representasi di dunia nyata. Informasi yang didapat di dunia maya juga berpengaruh di dunia nyata, maka persepsi juga mempengaruhi mereka. Citizen harus hadir di dunia maya memberikan informasi yang menguatkan negara. (Venus, Antar. 22/1/2021)

Era digital merupakan faktor nyata dalam kehidupan. Di era digital komunikasi/informasi menjadi faktor nyata yang harus diperhitungkan dalam pertahanan setelah sebelumnya menjadi hidden factor, dikarenakan melimpahnya data/informasi, akses media sosial terbuka dan meningkat, landscape diseminasi info berubah, literasi informasi rendah, kendali media online rendah, post truth, dan fenomena jaringan sosial (social network) menciptakan demokrasi informasi. Tiap orang punya kuasa/kontrol atas informasi tapi ini juga mengerikan karena potensi menjadi ancaman, apabila kita tidak berbuat bagi kepentingan negara, demokrasi, keharmonisan dan keutuhan bangsa. Akan ada orang yang memanfaatkan potensi tersebut untuk keuntungan mereka. Kondisi ini dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mempromosikan ideologi tandingan, politik identitas, intoleransi, disinformasi, pelecehan terhadap negara, ujaran kebencian, dan sebagainya.

Ada delapan aspek yang harus dipahami mengenai pemenangan informasi di ruang public maya, diantaranya: bangun kebanggaan terhadap bangsa/negara, buat visi bersama ke-Indonesiaan, pendekatan partisipatori, *challenge the opinion, full engagement* lembaga pendidikan/pesantren, pusat kendali informasi, bangun jaringan komunikasi/infiltrasi, lakukan amplifikasi faktor resiko. Intinya rebut kembali ruang publik, bangun lingkungan informasi yang mendukung kepentingan nasional. (Venus, Antar. 2021 dalam <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2021/01/antar-venus-bicara-membela-negara-di-dunia-maya.html>), diakses Tgl 19/2/2021.

Implementasi Pancasila Masa Pandemi

Krisis kesehatan bisa berkembang menjadi krisis sosial dan politik jika tidak ditangani dengan baik. Tentunya tidak dikehendaki bersama. Dampak dari pandemi Covid-19 memang luar biasa. Ekonomi terpuruk. Pengangguran meningkat. Resesi di depan mata. Krisis 2020 berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Ini bukan sekedar resesi, bukan sekedar depresi, melainkan paralisis. Satu sistem yang tiba-tiba membeku. Dan untuk kembali normal memerlukan waktu (Boediono dalam Kompas, 5 September 2020. Hal: 2). Pandemi bisa memakan waktu lama. Minimal sampai ditemukan dan efektifnya vaksin. Jika tak ditangani dengan benar, krisis sosial bisa terjadi. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, telah memporandakan berbagai sendi kehidupan. Tidak hanya kesehatan, kehidupan sosial, budaya, ekonomi pun terdampak wabah yang telah merenggut jutaan jiwa ini. Namun, di tengah kemuraman itu, bangsa ini tidak kehilangan sosok-sosok yang berjuang untuk sesama. Dari menyelamatkan nyawa hingga urusan perut.

Perang melawan Covid-19 harus dihadapi bersama dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Kerja teknokratis perlu dilakukan. Semua organisasi negara atau quasi negara, TNI, Polri, Satpol PP, Camat, Lurah, RW/RT harus bergerak bersama satu tujuan untuk menyadarkan masyarakat menggunakan masker. Begitu juga organisasi, seperti karang taruna, pramuka, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, perlu dilibatkan bekerja bersama mengubah perilaku masyarakat untuk menggunakan masker. Ini adalah kerja rekayasa sosial mengubah perilaku masyarakat. Dalam situasi dengan perasaan tak menentu, bangsa ini membutuhkan keteduhan dan optimisme. Yang dibutuhkan adalah narasi merajut tenun kebangsaan untuk bersama menghadapi pandemi dan resesi.

Kondisi pandemi Covid-19 berdampak positif pada peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Wujud yang tampak di tengah masyarakat ialah maraknya gotong royong. Saat pandemi Covid-19 ini masyarakat sudah banyak menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong. Gotong royong yang dilakukan masyarakat itu merupakan bukti implementasi nilai-nilai Pancasila. Budaya saling tolong membantu masyarakat dalam penanggulangan virus corona. Tidak ada saat menolong ditanya terlebih dahulu etniknya, agamanya apa. Sebagai contoh gotong royong warga di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebanyakan penduduk desa ini ialah petani sawit dan karet. Meski dengan tingkat pendidikan beragam, ternyata Kepala Desa, tidak sulit mengajak warganya bersatu dan bergotong royong, di masa pandemi Covid-19. Kepala Desa menyatukan potensi warga yang mampu untuk membantu warga kurang mampu. "Semula bentuknya hanya sembako. Warga bisa menabung kebaikan dalam bentuk sembako dan bisa diambil warga lain yang membutuhkan" (Jefri dalam Media Indonesia, 22 September 2020. Hal: 8).

Kearifan lokal yang dimiliki Indonesia merupakan dasar penguatan Pancasila. Kearifan lokal yang beragam di Indonesia merupakan kekayaan budaya yang mengandung kebijakan dan pandangan hidup. Untuk mengamankan Pancasila bisa digali dari berbagai hal dalam masyarakat, salah satunya kearifan lokal (Hariyono dalam Media Indonesia, 18 September 2020. Hal: 4).

Penerapan nilai-nilai Pancasila membutuhkan adaptasi dengan kekhasan yang dimiliki setiap daerah. Konsensus seluruh bangsa Indonesia ini dapat masuk ke semua aktivitas kehidupan dan mengantisipasi berbagai ancaman bangsa.

PENUTUP

Pentingnya institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila sejak pra, proses perumusan dan perancangan naskah peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan Pancasila. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila terutama dalam kebijakan-kebijakan publik, agar cita-cita dan tujuan kemerdekaan menjadi negara sejahtera bisa tercapai. Elit politik bersikap dewasa dalam menyikapi isu-isu radikalisme, terorisme, dan komunisme yang masih berkembang. Saat ini bangsa Indonesia juga harus fokus bergotong royong menghadapi pandemi Covid-19. Perbedaan pandangan berbagai elemen bangsa semestinya tidak perlu diperdebatkan, termasuk terkait dengan ideologi komunisme dan leninisme. Pasalnya, larangan ideologi tersebut sudah diatur dalam TAP MPRS. Hal yang lebih penting adalah rekonsiliasi semua anak bangsa.

Pendidikan karakter Pancasila tidak bisa hanya dimasukkan dalam kurikulum atau pun buku-buku pelajaran, tetapi justru ke dalam konten kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak mungkin belajar nilai-nilai, kalau tidak dilakukan melalui kegiatan pendidikan karakter yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Selain melalui berbagai kebijakan dan program, juga melakukan sosialisasi konten-konten yang dekat dengan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami melalui contoh nyata, bukan hanya filosofi. Membangun sistem informasi terpusat sehingga keluarga pasien tidak perlu harus berburu sendiri rumah sakit. Jika sistem informasi ketersediaan rumah sakit tersedia, itu akan lebih menenangkan. Para ahli teknologi informasi bisa dilibatkan untuk membuat sistem informasi ketersediaan ruang-ruang perawatan di fasilitas kesehatan berdasarkan lokasi terdekat. Efektivitas sosialisasi vaksinasi, perlunya informasi yang memadai, valid, dan diterima baik menjadi fokus utama sosialisasi harus menjadi gerakan pendidikan kesehatan yang masif. Pemerintah harus menggunakan semua cara, dan lembaga yang ada: media massa, media sosial, sekolah, perguruan tinggi, LSM dan sebagainya, dan sebagai amunisi bagi generasi itu, harus terdapat konten kependidikan yang sederhana dan terjangkau semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, Dedy. 2020. "Pemuda dan Agen Ideologi Bangsa". Dalam Kompas, 28 Mei 2020. Hal: 3.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2003. Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Jaya.
- Anwar Makarim, Nadiem. 2020. "Pendidikan Karakter Jadi Prioritas Utama". Dalam Media Indonesia, 28 Oktober 2020. Hal: 1.
- Arif, Syaiful. 2020. "Pemurnian Kembali Pancasila". Dalam Media Indonesi, 21 Oktober 2020. Hal: 6.
- Asim, Qari. 2021. "Para Imam Melawan Disinformasi Vaksinasi". Dalam Kompas, 28 Januari 2021. Hal: 4.
- Bamsuet. 2020. "MPR Serukan Penegakkan Etika Kehidupan Berbangsa". Dalam Media Indonesia, 12 November 2020. Hal: 5.
- Boediono. 2020. "Pandemi dan Kolaborasi Sosial". Dalam Kompas, 5 Mei 2020. Hal: 2.
- Burhani, Ahmad Najib. "Nilai-nilai Pancasila Tetap Relevan". Dalam Kompas, 6 November 2018. Hal: 4.

- Cahyono, Ma'ruf. 2018. "Ideologi Pancasila Bisa Diterima Generasi Milenial". Dalam *Media Indonesia*, 27 November 2018. Hal: 11.
- Nurul Fadilah. (2019). Tantangan dan Pengautan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)*, Vol 2 No 02 (2019).
- Jefri. 2020. "Gotong Royong Melahirkan Bank Desa". Dalam *Media Indonesia*, 22 September 2020. Hal: 8.
- Hariyono. 2020. "Implementasi Pancasila Meningkatkan Selama Pandemi". Dalam *Media Indonesia*, 18 September 2020. Hal: 4.
- Hendarman. 2020. "Komitmen Menciptakan Pelajar Pancasila". Dalam *Media Indonesia*, 25 November 2020. Hal: 2.
- Karsidi, Ravik. 2020. "Bila Bangsa Melupakan Sejarah". Dalam *Kompas*, 30 September 2020. Hal: 7.
- Latif, Yudi. 2018. "Radikalisasi Pancasila Penting Dilakukan". Dalam *Kompas*, 8 September 2018. Hal: 4.
- Mahfud. 2020. "Antara Islam, Pancasila, dan HAM". Dalam *Kompas*, 1 November 2020. Hal: 2.
- Manila, IGK. 2012. "Pendidikan dan Vaksinasi". Dalam *Media Indonesia*, 5 Februari 2021. Hal: 6.
- Moerdijat, Lestari. 2020. "Pandemi Momentum Wujudkan Semangat Bela Negara". Dalam *Media Indonesia*, 3 September 2020. Hal:3.
- Moerdijat, Lestari. 2020. "Toleransi Wali Songo Teladan Nilai Kebangsaan". Dalam *Media Indonesia*, 28 November 2020. Hal: 3.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Afifuddin. 2021. "Pancasila Bukan Penghalang Syariat Islam". Dalam *Kompas*, 21 Januari 2021. Hal: 5.
- Mu'ti, Abdul. 2020. "Pendidikan Agama untuk Rawat Pluralitas". Dalam *Kompas*, 3 September 2020. Hal: 5.
- Najmah, Sofia. 2020. "Lawan Hoaks dengan Semangat Persatuan". Dalam *Media Indonesia*, 8 September 2020. Hal: 7.
- Prasetyo, Andhika. 2020. "Semua Aturan Wajib Berpancasila". Dalam *Media Indonesia*, 28 November 2020. Hal 4.
- Pudjiastuti, S. R.(2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Paham Radikal. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*,19(2), 32-39.DOI: 10.21009/jimd.v19i02.14788.
- Romualdi, Kristoforus Bagas. 2020. "Merdeka dari Intoleransi". Dalam *Media Indonesia*, 8 September 2020. Hal: 7.
- Rumadi. 2018. "Nilai-Nilai Pancasila Tetap Relevan". Dalam *Kompas*, 6 Juni 2018. Hal: 4.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Erik. 2021. "Komunikasi Informal Cocok untuk Masyarakat Indonesia". Dalam *Media Indonesia*, 31 Januari 2021. Hal: 2.
- Syuriah, Rais. 2021. "Pancasila Bukan Penghalang Syariat Islam". Dalam *Kompas*, 21 Januari 2021. Hal: 5.
- Soekarnoputra. Guntur. 2020. "Pancasila dan Sosialisme Soekarno". Dalam *Kompas*, 15 September 2020. Hal: 7.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Venus, Antar. /2021 dalam <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2021/01/antar-venus-bicara-membela-negara-di-dunia-maya.html>), diakses Tgl 19/2/2021.